



PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM) KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) DI KAMPUNG PEKIJING KELURAHAN KALANG ANYAR KOTA SERANG-BANTEN

Surachman^{1*}, Efi Tajuroh Afiah², Ibrohim³, Nuniek Permata⁴

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa

Email: lrachmanbjr@gmail.com¹

Abstract

This paper is intended to present a comparative analysis of the implementation of a community empowerment based Kampung Climate's Leading Program (ProKim) in Pekijing Village, Serang City. The result of this research indicates that both in Pekijing Village have emphasized aspects of community empowerment in the implementation of ProKlim mainly in climate change adaptation and mitigation activities. Empowerment and participation of communities in Pekijing Village is considered improperly managed. However, in substance, ProKlim has been wellimplemented in each locus. Further in practice, ProKlim, with a persistent management, is perceived to be able to manage a microclimate which gives a wider impact on temperature deterioration in the capital city.

Keyword: *Participation, Climate Change, Kampung Climate's Leading Program, Community Empowerment*

Abstrak

Tulisan ini bermaksud menyajikan analisis komparatif implementasi Program Unggulan Kampung Iklim (ProKlim) berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pekijing Kota Serang. ProKlim terutama dalam kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di Desa Pekijing dinilai kurang terkelola dengan baik. Namun secara substansi, ProKlim telah dilaksanakan dengan baik di setiap lokus. Lebih lanjut dalam praktiknya, ProKlim dengan pengelolaan yang gigih dirasa mampu mengelola iklim mikro yang berdampak lebih luas terhadap penurunan suhu di ibu kota.

Kata Kunci: Partisipasi, Perubahan Iklim, Program Unggulan Kampung Iklim, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Didalam perubahan iklim sudah menjadi fenomena lingkungan yang nyata dan diakui sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan manusia. *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* menyebutkan bahwa kenaikan suhu permukaan bumi (global) berkisar antara 1,35°C dan diperkirakan akan terus meningkat antara 1,5-2°C pada periode 30 tahun mendatang. Kenaikan suhu bumi meningkatkan ancaman terhadap risiko terjadinya bencana terkait iklim seperti banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, kerusakan keragaman hayati, kenaikan muka air laut serta penurunan kualitas kesehatan manusia. Fenomena *globalwarming* menjadi pemicu utama reformasi “konstitusi hijau” (*green constitution*) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Green Constitution menjadi dasar penyelenggaraan asas-asas demokrasi lingkungan (*ecocracy*) yang menjamin prinsip keberlanjutan dalam proses perencanaan pembangunan

nasional/lokal. Di sisi lain prinsip-prinsip *sustainable development* yang dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup telah turut andil sebagai landasan utama tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan guna mendukung upaya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Di era *open government*, pembangunan lingkungan menjadi tanggung jawab utama pemerintah bersama *non-state actors* lainnya (masyarakat, swasta, komunitas/organisasi masyarakat) di bawah pengawasan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Political will* dan partisipasi publik dalam kerangka good environmental governance menjadi tolak ukur utama keberhasilan program pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Salah satu program berlingkup nasional berbasis pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup adalah Program Kampung Iklim (ProKlim) Program ini dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca.

Melalui pelaksanaan ProKlim, pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat lokal yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Pelaksanaan ProKlim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah minimal setingkat Dusun/Dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap daerah di tingkat dusun/desa atau Kelurahan minimal memiliki satu program unggulan Kampung Iklim. Setidaknya, tercatat sebanyak 180 ProKlim yang tersebar di 69 Kabupaten/Kota pada tahun 2013, pada tahun 2016, jumlah ProKlim nasional di tingkat desa adalah 290 ProKlim, jumlah ini dicanangkan akan meningkat menjadi 2000 ProKlim yang ditargetkan berfungsi secara maksimal pada awal tahun 2019 (Kompas, 2017). Implementasi ProKlim di Kota Serang sudah cukup baik. Program nasional Kampung Iklim dinilai mampu menjadi salah satu solusi pembangunan lokal yang berkelanjutan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, kesehatan, pendidikan lingkungan hidup serta tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan. Pengabdian ini difokuskan pada analisis ProKlim di Kampung Pekijing Kelurahan Kalang Anyar Kecamatan Taktakan Kota Serang



Gambar 1. Pintu masuk Kampung Pekijing

Program nasional Kampung Iklim dinilai mampu menjadi salah satu solusi pembangunan lokal yang berkelanjutan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, kesehatan, pendidikan lingkungan hidup serta tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan. Pengabdian ini difokuskan pada analisis ProKlim di Kampung Pekijing Kelurahan Kalang Anyar Kecamatan Taktakan Kota Serang,

Analisis pengabdian mengenai ProKlim difokuskan pada realisasi prinsip-prinsip *sustainable development* menggunakan basis pemberdayaan masyarakat. Unsur pemberdayaan diukur dari peran aktif masyarakat dalam ProKlim dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan partisipasi, yaitu *citizen control, delegate power, partnership, placation, consultation, informing, therapy, manipulation* (Arnstein, 1971).

Selanjutnya, implementasi prinsip-prinsip *sustainable development* didasarkan pada tiga komponen utama kegiatan ProKlim yaitu kegiatan adaptasi perubahan iklim, kegiatan mitigasi perubahan iklim, dan kelompok masyarakat dan dukungan berkelanjutan. Melalui ProKlim, indikator keberhasilan *sustainable development* didasarkan pada pendekatan *bottom-up* berbasis strategi pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada empat elemen kunci, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan dan stabilitas politik.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan adalah suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, dan pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur yang belum ada (Rustiadi, 2009). Wacana lingkungan hidup dan pelestarian alam menjadi bagian penting dari proses pembangunan. Selain itu tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam negeri bahwa kelestarian

lingkungan sudah merupakan suatu keharusan dan sudah merupakan kebutuhan hidup. Dalam skala negara, implementasi kewajiban dan kesadaran akan kelestarian lingkungan diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru adalah salah satu contoh pembangunan yang berlandaskan prinsip *sustainability*. Pembangunan berkelanjutan berinti pada pencapaian keseimbangan antara pembangunan sector ekonomi, pembangunan sector social, dan perlindungan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan diatur secara legal dalam *green constitution* dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Undang-Undang ini, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Konsep *sustainable development* menjadi paradigma baru dalam kajian pembangunan perkotaan yang berorientasi pada prinsip *sustainability*.

Keberlanjutan lingkungan hidup manusia selain tergantung kepada perlindungan lingkungan alamiah dan upaya pemenuhan akan kebutuhan dasar (hunian, kesehatan, makanan dan pekerjaan), juga meliputi perencanaan lingkungan binaan dengan segala elemen pembentuknya (bangunan, ruang terbuka, norma estetika dan warisan budaya).

ProKlim merupakan salah satu bentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan komunitas. Meskipun program ini bersifat nasional dan dapat diimplementasikan di semua wilayah baik kota maupun desa, ProKlim di wilayah perkotaan dapat menjadi solusi permasalahan lingkungan hidup seperti polusi, banjir, sampah, lingkungan kumuh, dan penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Secara teoritis, kualitas lingkungan kehidupan merupakan salah satu dimensi utama dalam konsep pembangunan berkelanjutan (Hall, 2000). Kini, fokus pengabdian keberlanjutan tidak lagi hanya sebatas persoalan lingkungan alami dalam pemahaman ekologi global (kualitas udara, air, keragaman hayati, tanah, mineral dan energi), tapi juga kepada lingkungan binaan manusia, seperti bangunan, infrastruktur, dan ruang terbuka hijau yang menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan (Hall & Richards, 2002).

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus atau *breakdown* dari hubungan antara subyek dan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya distribusi daya (*power*) dari subyek ke obyek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang

semula menjadi obyek berubah sebagai subyek (yang baru), sehingga realisasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antara subyek dengan subyek yang lain (Pranarka & Vidhyandika, 1996).

Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara (Kartasmita, 1996). **Pertama**, menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat kemandirian dan keberdayaan masyarakat adalah keyakinan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mengorganisasikan dirinya sendiri yang perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian kemandirian setiap individu yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional. **Kedua**, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana, baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah. **Ketiga**, memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi yang lemah dan membela kepentingan masyarakat. Artinya, proses pemberdayaan masyarakat didasarkan pada implementasi nilai-nilai *social equity* yang tidak memberikan keberpihakan pada kalangan masyarakat tertentu.

Dalam ProKlim, strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu, demokratisasi proses pembangunan. Konsep pemberdayaan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada lapisan masyarakat paling bawah (RT/RW/Dusun/Desa) untuk terlibat dalam pengalokasian sumber daya pembangunan. Pembangunan berkelanjutan yang digerakkan oleh masyarakat sekaligus menjadi wahana pembelajaran pencerdasan bagi masyarakat untuk mengenali kebutuhannya sendiri serta melaksanakan dan melestarikan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, melalui ProKlim, Badan Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup di setiap daerah memberikan ruang partisipasi publik untuk mendukung upaya penguatan peran organisasi kemasyarakatan lokal dalam pembangunan memiliki fungsi pengawasan dan monitoring. Di sisi lain, komponen kegiatan ProKlim juga mengedepankan upaya *social capital building*, yaitu penguatan modal sosial melalui pelebagaan nilai-nilai luhur yang bersifat universal, yakni, kejujuran, kebersamaan, dan kepedulian.

Strategi inti yang relevan dengan ProKlim adalah *community development* atau pengembangan komunitas. Berkembangnya konsep *community development* yang berbasis partisipasi dan kemandirian (*selfreliance*) dalam masyarakat tidak terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan komunitas merupakan strategi pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan semua subyek pembangunan dapat terlibat dalam setiap proses/kegiatan yang

mencakup perencanaan, pengawasan dan evaluasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa *community development* merupakan salah satu metode yang tepat untuk menjawab isu-isu dan masalah-masalah sosial di Indonesia. Terlebih lagi kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih menerapkan sistem komunal merupakan modal penting bagi pelaksanaan *community development*.

Community development secara luas dipahami sebagai sebuah proses yang diinisiasi oleh usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisisosial, ekonomi, lingkungan, dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas kedalam kehidupan nasional dan mendorong optimalisasi kontribusi komunitas (Alfitri, 2011). Terdapat tiga pendekatan untuk perencanaan *community development*, yaitu; *development for community* (pencetus pemberdayaan adalah perusahaan berstatus pendonor, sedangkan komunitas adalah sebagai obyek), *development with community* (pemberdayaandalamhalinidirumuskanber sama-sama oleh perusahaan pendonor dan masyarakat), dan *development to community* (pemberdayaan dengan pendekatan ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan komunitas).

METODE PELAKSANAAN

Metode Pelaksanaan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) saat ini adalah lebih menitik beratkan pada pelaksanaan kegiatan masyarakat yang sudah disusun secara sistematis. Dilaksanakan oleh Mahasiswa dan Dosen Universitas Bina Bangsa dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengunjungi masyarakat dan sumber-sumber data yang dibutuhkan untuk dimintai keterangan melalui wawancara langsung baik secara pribadi maupun secara organisasi atau sumber data yang diperoleh melalui kantor kelurahan atau kantor kecamatan.

Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi kegiatan. Wawancara yang dilakukan untuk kegiatan ini memiliki tujuan agar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang program kerja yang sedang dijalankan. Lokasi pengabdian dilakukan di Kampung Pekijing, Kelurahan Kalang Anyar Kota Serang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengurai Adaptasi Perubahan Iklim

Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus atau *breakdown* dari hubungan antara subyek dan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya distribusi daya (*power*) dari subyek ke obyek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula menjadi obyek berubah sebagai subyek (yang baru), sehingga realisasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antara subjek dengan subjek yang lain (Pranarka &

Vidhyandika, 1996). Dalam konteks pelaksanaan ProKlim, subjek pelaksanaan tiada lain adalah masyarakat (kampung) itu sendiri. Oleh karenanya, pelaksanaan ProKlim tidak bisa dilakukan dengan perspektif *top-down*. Program tersebut perlu dijangkarkan pada partisipasi publik. Tanpa partisipasi, berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah akan menjadi sia-sia belaka. Harapan dari dilaksanakannya ProKlim adalah membangun masyarakat yang bertanggungjawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Namun hal yang perlu menjadi catatan, masyarakat akan menjadi bertanggungjawab bila pemerintah pun memiliki kesadaran dan tanggungjawab yang sama. Karena pada dasarnya problem perubahan iklim adalah masalah global yang juga bersifat struktural. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat internasional. Kerusakan yang terjadi pada lingkungan hidup adalah dampak dari pembangunan global yang tidak berbasis pada keberlanjutan manusia. Laporan dengan judul *The Limits to Growth* yang ditulis Meadows kepada *The Club of Rome (Projecton the Predicament of Mankind)* menjelaskan tentang berbagai permasalahan yang menimpa banyak negara dan perlu perhatian global, yaitu kemajuan industrialisasi, pertumbuhan penduduk, kekurangan pangan, kerusakan sumber daya alam yang tidak terbarui, dan pencemaran lingkungan (Supriadi, 2010). Namun hadirnya ProKlim adalah upaya yang perlu diapresiasi. Lahirnya kebijakan tersebut berangkat dari kesadaran negara tentang bahaya perubahan iklim.

Kembali pada konteks pengabdian, salah satu indikator keberhasilan yang ditetapkan oleh KLHK dalam pelaksanaan ProKlim adalah adanya kegiatan adaptasi perubahan iklim.



Gambar 2. Pintu masuk Kampung Pekijing

Kegiatan adaptasi perubahan iklim merupakan langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga efek rusak dari perubahan iklim tersebut bisa direduksi, begitupula sebaliknya peluang yang terjadi karena perubahan iklim dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta konsekuensi lainnya yang timbul karna perubahan iklim dapat diatasi. Baik di Kampung Pekijing

secara bertahap sudah melaksanakan berbagai upaya dalam kegiatan adaptasi perubahan iklim. ProKlim di kampung Pekijing tepatnya berlokasi di RW 008, program ini sudah diinsiasi pelaksanaannya pada tahun 2019 silam. Sedangkan lokasi ProKlim di Kampung Pekijing Desa Kalang Anyar adalah di RW 008. Dari hasil pengabdian, lokasi ProKlim tersebut dominan melaksanakan program-program kampung iklim (ProKlim) yang telah direncanakan, seperti 1) Melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, 2) berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan 3) meningkatkan kemadirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, menegmbangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Seperti contoh; berbagai tanaman hias berjejer rapi di pagar rumah-rumah warga kampung pekijing RW.008 Kelurahan Kalang Anyar ini seperti menjadi oase di tengah-tengah perkampungan. Taman perkampungan sebagai pusat kegiatan-kegiatan masyarakat kampung Pekijing yang didirikan warga ini menjadi penyanggah ekosistem keseimbangan lingkungan sekitar Kampung Pekijing. Taman tersebut menjadi sarana dan prasarana kegiatan-kegiatan masyarakat baik itu di bidang sosial dan budaya. Taman tersebut dikelola dengan basis partisipasi aktif dari warga yang didukung oleh pembinaan yang baik dari pihak Kelompok Penggerak Program Kampung Iklim dan juga ada kolaborasi yang baik antara pemerintah lokal dengan warga setempat.



Gambar 2. Penanaman Pohon bersama anak-anak Kp. Pekijing

Walaupun dalam skala kecil, ProKlim dinilai mampu menurunkan temperatur kawasan karena pengaruh *micro-climate*. Selain itu ProKlim bermanfaat dalam menjaga ketersediaan air tanah, ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, rekreasi bahkan meningkatkan kekompakan bagi warga. Hal ini yang diakui oleh masyarakat sekitar, baik di Kampung Pekijing. Impelementasi ProKlim di tingkat warga secara perlahan mampu meningkatkan kebersamaan dan kelembagaan di masyarakat. Pada dasarnya, aparat pelaksana di kedua tempat telah melakukan sosialisasi program

dengan sangat baik, warga diundang oleh pemerintah lokal setempat (kelurahan) untuk memberikan edukasi terkait ProKlim. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat yang bersifat *bottom-up*, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi tidaklah cukup, perlu pendampingan dari pemerintah maupun swasta (perusahaan) secara serius, sehingga tujuan dari kemandirian warga bukan dengan cara meninggalkan mereka. Pendampingan pihak pemerintah setempat terhadap warga Kampung Pekijing terkait dengan pelaksanaan ProKlim lebih konsisten dan optimal dibanding dengan kampung yang lain.

Secara regulasi, penataan ProKlim diatur sesuai dengan Perpres No. 61/2011 RAN-GRK dan Perpres 71/2011 tentang tata Cara Inventarisasi Emisi GRK sesuai dengan Peraturan MenLH No. 19 tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. Tentunya kedua kampung iklim yang menjadi lokasi pengabdian telah menjadikan regulasi tersebut sebagai acuan dalam menjalankannya. Tapi hasil dari pelaksanaan kampung iklim sedikit berbeda.



Gambar 3

Kunjungan Pemerintah Desa
memeriksa alat Penyulingan sampah
plastik jadi BBM



Gambar 4

Penyulingan sampah plastik menjadi BBM

Kampung Pekijing pernah mendapatkan penghargaan terkait dengan kantor teresik dan kampung literasi 2020. Harusnya capaian ini bisa menjadi modal awal untuk penyebarluasan kegiatan mitigasi ke masyarakat yang lebih luas. Untuk konteks kegiatan pengendalian penyakit terkait iklim, warga Kampung Pekijing sudah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan baik dan adanya bank sampah yang di kelola oleh masyarakat sehingga menjadikan nilai

tambah bagi masyarakat Kampung Pekijing, selain itu masyarakat juga mengelola sampah plastik untuk di jadikan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Tabel 1 Komprasi Kegiatan Adabtasi Perubahan Iklim di Kampung Pekijing Kelurahan Kalang Anyar

Kegiatan			
Lokasi	Pengendali kekeringan dan longsor	Peningkatan ketahanan pangan	Pengendalian terkait penyakit iklim
Kampung Pekijing Kelurahan Kalang Anyar	Tersedia sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya longsor	1. Ada upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tanaman loka untuk peningkatan ketahanan pangan 2. Ada pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman bermanfaat	Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Upaya Mitigasi Perubahan Iklim

Aspek lain yang penting dalam pelaksanaan ProKlim adalah kegiatan mitigasi perubahan iklim. Mitigasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Kegiatan mitigasi dapat dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar rumah sampai dengan yang dilaksanakan secara berkelompok dengan melibatkan warga di lokasi kampung iklim. Perilaku hemat energi, transportasi hijau, pengelolaan sampah, penanaman pohon serta pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang melibatkan masyarakat adalah contoh kegiatan mitigasi yang perlu terus menerus dikampanyekan kepada seluruh pihak (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017b).

Di lokasi pengabdian, aktivitas mitigasi dilakukan secara sederhana, namun tetap melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam level yang bervariasi di lokasi kampung iklim. Salah satu hal yang menjadi sorotan utama warga adalah mengenai masalah sampah. Ihwal yang penting dari

aktivitas ini dikerjakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misalkan, ProKlim di Kampung Pekijing yang dirintis sejak tahun 2019 ini diawali oleh inisiasi minoritas kreatif lokal yang berasal dari perangkat desa tingkat RW (RW 008). Kelompok Penggerak Program Kampung Iklim (Proklim Pekijing) yang menjadi inisiator kreatif tidak segan mendorong masyarakat untuk membersihkan tumpukan sampah tersebut dan meminta bantuan langsung kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang berupa kendaraan pengangkut sampah. Pemerintah, melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Serang memberikan tanaman pelindung seperti pohon tanjung, angkana, bungur, kupu-kupu, yang kemudian oleh warga digunakan sebagai bentuk penghijauan. Sebagian dari warga pun ada yang memiliki inisiatif menanam tanaman obat dan tanaman hias untuk mempercantik di lingkungan Kampung Pekijing. Dari hal kecil ini kemudian semakin beresonansi dan berjalan lebih sistematis. Ketika proses penghijauan sudah baik, kemudian perangkat desa mendorong lebih maju capaian kolektif tersebut dengan mengadakan pengelolaan Sampah organik. Secara swadaya, mitigasi yang dilaksanakan di Kampung Pekijing, meningkat dengan membangun bank sampah pada akhir tahun 2019. Momentum reaktivasi bank sampah ketika hadir program *Cost Social Responsibility* (CSR) PT Djarum berupa hibah berupa alat penyulingan sampah plastik dijadikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Bentuk pemberdayaan yang terlaksana di Kampung Pekijing merupakan manifestasi *development with community*, yakni ada peran perusahaan yang berpartner dengan masyarakat. Dalam praktiknya, secara gradual masyarakat Kampung Pekijing ikut berpartisipasi dan kembali aktif dalam pengelolaan bank sampah tersebut. Setidaknya terkait dengan problem sampah, Kelurahan Jati telah memiliki alternatif sebagai kegiatan mitigasi.

Secara umum, pengembangan komunitas yang terjadi di Kampung Pekijing Kelurahan Kalang Anyar sudah menuju tahap *development of community*, yakni agensi pembangunan dominan diinisiasi langsung oleh masyarakat setempat. Dalam beberapa konteks, ada peran pemerintah yang memberikan daya dukung untuk membantu komunitas, namun bantuan tersebut berangkat dari aspirasi langsung masyarakat.

Tabel 2

Komparasi Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim di Kampung Pekijing Kelurahan Kalang Anyar

Kegiatan				
Lokasi	Pengelolaan sampah dan limbah padat	Pengolahan dan Pemanfaatan Limbah Cair	Penggunaan Energy baru, terbarukan dan konservasi energy	Peningkatan tutupan vegetasi

Kampung Pekijing Kelurahan Kalang Anyar Kota Serang	Bank sampah Pekijing	Pupuk kompos	Masih dalam bentuk sosialisasi	Penghijauan
---	-------------------------	--------------	-----------------------------------	-------------

Praktik Pemberdayaan

Berkembangnya konsep *community development* yang berbasis partisipasi dan kemandirian (*selfreliance*) dalam masyarakat tidak terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan komunitas merupakan strategi pemberdayaan masyarakat yang memungkinkan semua subyek pembangunan dapat terlibat dalam setiap proses/kegiatan yang mencakup perencanaan, pengawasan dan evaluasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa *community development* merupakan salah satu metode yang tepat untuk menjawab isu-isu dan masalah-masalah sosial di Indonesia. Terlebih lagi kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih menerapkan sistem komunal merupakan modal penting bagi pelaksanaan *community development*.

Bila dilihat dari perspektif *community development* (Isbandi, 2010) dinamika pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang terjadi di Kampung Pekijing Kelurahan Kalang Anyar Kota Serang lebih koheren dan ada titik kesinambungan. Misalnya dalam tahap *engagement*, perangkat desa dan masyarakat di Kelurahan Kalang Anyar turut serta dalam menentukan lokasi dan sasaran ProKlim dengan observasi dan pengalaman langsung warga terkait dengan tumpukan sampah yang menjadi masalah sehari-hari mereka. Komunikasi awal yang dilakukan melalui musyawarah yang konsisten untuk melihat ketertarikan masyarakat untuk menjalankan ProKlim ini bersama-sama.

Pelaksanaan ProKlim pada dasarnya ditujukan untuk melatih dan merawat proses partisipasi masyarakat dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung Pekijing Kelurahan Kalang Anyar, saat ini sudah terbangun kelompok masyarakat yang menggawangi pelaksanaan ProKlim dinamakan Kelompok Penggerak Program Kampung Iklim sehingga kalau dilihat dari segi tingkat partisipasi dan dinamika kemasyarakatan Kampung Pekijing sangat tinggi. Dalam banyak aspek, warga telah memiliki peran untuk mengontrol pelaksanaan (*citizen control*) ProKlim dibanding dengan kampung lain. Penulusuran awal, hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat di Kampung Pekijing sudah tinggi. Hal ini terbukti beberapa kali Kampung Pekijing mendapatkan penghargaan terkait dengan lingkungan hidup dan menjadi kampung teresik.

Untuk pengelolaan ruang publik maka diperlukan kontrol yang disepakati secara konsensus (Faedlulloh, Prasetyanti, & Indrawati, 2017). Ruang-ruang yang melekat dalam praktik ProKlim ini tak lain adalah bagian besar dari ruang publik. Maka diperlukan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan juga masyarakat dalam proses pelaksanaan ProKlim. Dalam hal ini, sudah ada

kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah lokal, yakni pihak Kampung Pekijing Kelurahan Kalang Anyar membina dengan baik para pelaksana ProKlim melalui Kelompok Penggerak Program Kampung Iklim. Secara regular, pihak kelurahan selalu melakukan sosialisasi dan komunikasi bersama warga. Unsur perusahaan pun ikut terlibat menjadi stakeholder dari ProKlim di Kampung Pekijing, salah satunya PT Djarum dalam bentuk bantuan langsung alat untuk penyulingan sampah plastik menjadi BBM. Titik tekan keberhasilan sebuah program yang berbasis *bottom-up* adalah partisipasi, sehingga kegiatan yang telaksana bukan sekadar penggugur kewajiban melainkan dampak refleksi kritis dari masyarakat setempat yang sadar akan pentingnya pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal/kampung. Memang, dinamika yang terjadi di Kelurahan Kalang Anyar tidak berjalan begitu saja. Ada inisiator dari segelintir tokoh pemuda penggerak di kampung pekijing (pemimpin lokal) yang konsisten dan setia melaksanakan tanggung-jawab menjaga lingkungan dan mampu menyebarkan kegiatan adaptasi dan mitigasi ke khalayak yang lebih luas akhirnya kapasitas masyarakat pun tumbuh. Secara aktivitas pun berkembang, yang pertama dari sekadar bersih-bersih sampah, kemudian penghijauan kemudian berkembang mendirikan bank sampah sampai dengan rencana-rencana kegiatan mitigasi lainnya.

KESIMPULAN

Program Kampung Iklim yang dilaksanakan di Kampung Pekijing Kelurahan Kalang Anyar saat ini berjalan dengan baik. Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Kampung Pekijing Kelurahan Kalang Anyar menekankan pada pemanfaatan ruang publik untuk dijadikan sebagai taman yang resik. ProKlim di Kampung Pekijing juga mendukung program *zero waste*, sampah-sampah di sekitar wilayah kampung dikumpulkan dan di simpan di Bank Sampah “Jagar Resik” untuk diolah dan diproduksi menjadi pupuk kompos, dan untuk sampah plastik diproses dalam penyulingan menjadi BBM. Taman yang dibangun sebagai lokasi ProKlim dikelola dengan basis partisipasi aktif dari warga yang didukung oleh pembinaan yang baik dari pihak aparat Kelurahan Kalang Anyar. Ada kolaborasi yang baik antara pemerintah lokal dengan warga setempat.

Baik dalam aktivitas adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan di Kampung Pekijing Kelurahan Kalang Anyar menekankan pentingnya proses pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Saat ini masyarakat akhirnya lebih berdaya dalam menghadapi perubahan iklim. Memang pada dasarnya, perubahan iklim adalah masalah global yang tidak bisa diselesaikan dalam skala kampung, namun setidaknya langkah-langkah kecil yang dilakukan warga Kampung Pekijing Kelurahan Kalang Anyar ini bila dijalankan secara konsisten dan mampu mempengaruhi kampung-kampung lainnya, tidak menutup kemungkinan mampu merekayasa iklim mikro yang

berdampak pada penurunan temperatur di daerah secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandita, D. (2014). Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5), 853–861.
- Faedlulloh, D., Prasetyanti, R., & Indrawati. (2017). Menggagas Ruang Publik Berbasis Demokrasi Deliberatif: Studi Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Utara. *Spirit Publik*, 12(2), 43–60.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017b). *Road Map Program Kampung Iklim (Proklam) Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kompas. (2017). Sebanyak 2000 Kampung Iklim Ditargetkan Berfungsi di 2019. Retrieved from <http://nasional.kompas.com>
- Nopyandri. (2014). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Rangka Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, 80-94.